

# **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah dilakukannya penyetoran modal tambahan kepada PT Hamparan Logistik Nusantara (“HLN”) oleh PT Batutua Tambang Abadi (“BTA”), yang keduanya merupakan Perusahaan-perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.**

## **Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya

## **Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Kantor Pusat**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon: +62 21 2988 0393  
Faksimili: +62 21 2988 0392  
Email: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)  
Website: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022

## DEFINISI DAN SINGKATAN

<b>“Afiliasi”</b>	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none"><li>1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
<b>“Benturan Kepentingan”</b>	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
<b>“BTA”</b>	:	PT Batutua Tambang Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
<b>“Bursa Efek Indonesia”</b>	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>“HLN”</b>	:	PT Hampan Logistik Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>“Kemenkumham”</b>	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Menkumham”</b>	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”</b>	:	Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.
<b>“Pemegang Saham”</b>	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
<b>“Penilai Independen atau KJPP”</b>	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.

- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Terkendali”** : suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 30 Juni 2022, BTA telah melakukan penyetoran modal tambahan dan mengambil bagian saham baru yang diterbitkan oleh HLN sebanyak 292.907 (dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp292.907.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta Rupiah) sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham HLN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HLN No. 90 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0258408 tanggal 30 Juni 2022 (**“Akta 90/2022”**). Adapun nilai penyetoran yang dilakukan oleh BTA atas penerbitan saham-saham baru tersebut adalah sebesar Rp376.867.612.856,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah), di mana sebesar Rp83.960.612.856,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) dicatatkan oleh HLN sebagai agio (**“Transaksi”**). Setelah efektifnya Transaksi, maka BTA memiliki sebanyak 55,3% (lima puluh lima koma tiga persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh HLN. Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung lebih lanjut tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh HLN.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana baik BTA maupun HLN merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00254/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Hamparan Logistik Nusantara oleh PT Batutua Tambang Abadi ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

#### 1. BTA

BTA merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 147 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068145.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 ("**Akta Pendirian BTA**").

Perubahan Anggaran Dasar BTA terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013782.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0123227 tanggal 24 Februari 2022 ("**Akta 95/2022**").

Berdasarkan Akta Pendirian BTA *juncto* Akta 95/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BTA adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin  
Direktur : Cahyono Seto

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Saputro

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian BTA *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0172611 tanggal 16 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 200.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 50.000.000
Modal Disetor	:	Rp 50.000.000

Modal Dasar BTA tersebut terbagi atas 800 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp250.000 per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	199	49.750.000	99,50
2.	PT Batutua Abadi Jaya	1	250.000	0,50
<b>Jumlah</b>		<b>200</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>600</b>	<b>150.000.000</b>	

Dengan demikian, BTA merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BTA, maksud dan tujuan BTA adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BTA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
- b. menjalankan kegiatan usaha jasa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan tujuan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

## 2. HLN

HLN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar HLN terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 90/2022.

HLN berkantor pusat di RDTX Tower Lantai 16, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar HLN, maksud dan tujuan HLN adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, HLN dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan

2. menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

#### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham HLN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022 ("**Akta 54/2022**") *juncto* Akta 90/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam HLN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp7.918.157.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp7.918.157.000.000,00

Modal Dasar HLN terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000,00.

Dengan demikian susunan pemegang saham HLN adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	BTA	4.375.584	4.375.584.000.000	55,3
2.	PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	15,4
3.	Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	8,6
4.	PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,6
5.	Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,7
6.	Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	4,8
7.	Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,9
8.	Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	3,3
9.	Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,3
10.	Trifena	8.000	8.000.000.000	0,1
<b>Jumlah</b>		<b>7.918.157</b>	<b>7.918.157.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>12.081.843</b>	<b>12.081.843.000.000</b>	

## Susunan Dewan Komisaris dan Direksi HLN

Berdasarkan Akta 54/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris HLN pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Simon James Milroy  
Komisaris : Albert Saputro  
Komisaris : David Thomas Fowler

### **Direksi**

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan  
Direktur : Andrew Phillip Starkey  
Direktur : Eko Widodo

## **Nilai Transaksi**

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp376.867.612.856,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan: (i) Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

## **Sifat dan Hubungan Afiliasi**

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan terhadap BTA dan HLN adalah sebagai berikut:

- a. BTA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima nol persen);
- b. HLN merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang mana pada saat sebelum berlaku efektifnya Transaksi, sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 55,67% (lima puluh lima koma enam tujuh persen); dan
- c. terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi BTA serta HLN yang juga menjabat sebagai Direksi Perseroan.

## **RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

KJPP Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 095.7/IDR/DO.2/Pr-BFO/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

### **Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00254/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BTA dan HLN, di mana BTA sebagai pihak melakukan setoran modal pada HLN dan HLN sebagai penerima setoran modal dari BTA.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi setoran modal pada HLN oleh BTA (Perusahaan-perusahaan Terkendali Perseroan).

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai Akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran yang diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- nilai dari objek yang ditransaksikan;
- dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham; dan
- pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut di atas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis kewajaran nilai transaksi; dan
5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai Transaksi lebih tinggi namun masih dalam kisaran nilai pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan laba yang diatribusikan kepada Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk mempertahankan kepemilikan saham BTA pada HLN yang sekaligus dapat mempertahankan laba yang diatribusikan kepada Perseroan melalui BTA yang akan meningkatkan dividen bagi pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

## **PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

### **Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi sesama entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	185.470.530	-	185.470.530
Piutang usaha	592.526	-	592.526
Piutang lain-lain	5.212.746	-	5.212.746
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	-	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	-	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	-	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	-	1.431.005
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>411.315.044</b>	<b>-</b>	<b>411.315.044</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	-	33.492.919
Uang muka investasi	80.160.000	-	80.160.000
Investasi pada saham	1.603.100	-	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	-	8.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	-	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	-	10.828.539
Aset tetap	298.216.345	-	298.216.345
Aset hak guna	18.056.266	-	18.056.266
Properti pertambangan	79.378.252	-	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	-	253.482.867
Aset pajak tangguhan	14.482.810	-	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	-	5.035.498
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>867.277.615</b>	<b>-</b>	<b>867.277.615</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.278.592.659</b>	<b>-</b>	<b>1.278.592.659</b>

<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	29.609.241	-	29.609.241
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	-	29.190.451
Pendapatan diterima di muka	5.468.036	-	5.468.036
Utang pajak	3.301.330	-	3.301.330
Utang lain-lain	19.618	-	19.618
Pinjaman bagian lancar			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	63.966.178	-	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673	-	143.555.673
Liabilitas sewa	22.061.962	-	22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	-	-
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	-	68.970
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>297.241.459</b>	<b>-</b>	<b>297.241.459</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	-	-	-
Utang obligasi	126.288.054	-	126.288.054
Liabilitas sewa	21.932.239	-	21.932.239
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	-	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	18.302.290	-	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	-	34.718.787
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>201.940.903</b>	<b>-</b>	<b>201.940.903</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>499.182.362</b>	<b>-</b>	<b>499.182.362</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.779.498	-	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	-	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	-	35.480.390
Saldo laba	224.361.211	-	224.361.211
Kepentingan non pengendali	23.843.865	-	23.843.865
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>779.410.297</b>	<b>-</b>	<b>779.410.297</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.278.592.659</b>	<b>-</b>	<b>1.278.592.659</b>

(\*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Desember 2021.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Transaksi dilakukan karena BTA memiliki kepentingan atas pengembangan kegiatan usaha HLN dan sebagai bentuk dukungan pemegang saham HLN untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan tindakan korporasi yang akan dilaksanakan HLN ke depannya. Saat ini masih belum terdapat alternatif lain untuk melakukan transaksi dengan pihak lain selain dengan BTA, sebagai pemegang saham HLN, untuk mencapai tujuan tersebut.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara BTA dan HLN, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

## **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan: (i) Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk.  
Corporate Secretary**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Website: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf: 